

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2021**

**Jefri Ananda Ginting<sup>1)</sup>, Henny Yulsiati<sup>2\*)</sup>, Yevi Dwitayanti<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

\*Corresponding author: [henny.yulsiati@yahoo.com](mailto:henny.yulsiati@yahoo.com)

***Abstrak***

*Kegiatan meneliti ini mempunyai tujuan supaya memahami adanya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penggunaan sampel dalam kegiatan meneliti ini mempergunakan purposive sampling yakni kabupaten/kotapada Provinsi Sumatera Utara yang pernah memiliki kinerja keuangan yang baik minimal 1 kali berdasarkan rasio efisensi (dengan persentase <100%) selama tahun 2017-2021. Hasil dari penelitiannya menandakan yaitu terdapat pengaruh pendapatan asli daerah kepada kinerja finansial Pemda sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.*

***Kata kunci:*** DAU ;Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; PAD

***Abstract***

*This study aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds, on the financial performance of local governments. This research is a quantitative research. The sample used in this study uses purposive sampling, namely districts/cities in the provinc of North Sumatra that have had good financial performance at least 1 time based on the efficiency ratio (with a percentage of <100%) during 2017-2021. The results of the study indicate that there is an effect of regional original income on the financial performance of local governments while general allocation funds have no effect on the financial performance of local governments.*

***Keywords:;*** DAU; Local Government Financial Performance; PAD

## 1. PENDAHULUAN

Sumatera Utara yakni salah satu wilayah di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini diawali dengan penyerahan wewenang atau tanggung jawab yang bersumber dari pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kebijakan otonomi daerah ini dilaksanakan dengan disahkannya UU No.22 Tahun 1999 (lalu diganti menjadi UU No.32 Tahun 2004 dan kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014) mengenai pemerintahan daerah serta UU No. 25 Th. 1999 (lalu jadi UU No. 33 Tahun 2004) mengenai kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 70 miliar tidak dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hasil survei BPK RI baru-baru ini. Sementara itu, tingkat pencapaian dana untuk hasil

perpajakan sekadar 81,28% dan lain-lain pendapatan yang sah hanyalah 65,23%. Kemerosotan perekonomian pada sumut yang kala itu terdapat kontraksi 1,07% dan juga banyak terlebih lagi banyak pejabat yang mempunyai status pelaksana tugas (plt) yang berdasarkan fraksi ini menciptakan kinerja kurang optima finansial daerah tersebut, yang dimana daerah otonom daerah otonom membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk *mengeksplorasi* sumber daya keuangan mereka sendiri (Jauhar, 2016)

Pengelolaan finansial daerah dilaksanakan secara baik serta optimal sejalan terhadap aturan yang diberlakukan, kinerja keuangan pemerintah itu sendiri. Maka kinerja dapat diartikan sebagai penjelasan tentang pencapaian suatu pelaksanaan/program, serta kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi dalam organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah berarti suatu pedoman ataupun indikator yang bisa dipakai suatu daerah dalam menentukan apakah suatu daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah penggunaan analisis rasio keuangan APBD, yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Menurut

Ofasari (2018), kinerja keuangan dikatakan efisien apabila diperoleh nilai kurang dari 100%, efisiensi berimbang berada pada persentase 100% dan apabila lebih dari 100% dikatakan tidak efisien.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### 2.1. Teori Keagenan

Menurut Bastian (2006 : 213) teori Agensi (*agen theory*), atau yang sering disebut juga *contracting theory*, merupakan salah satu kebutuhan riset akuntansi terpenting saat ini. Penelitian yang dilakukan pada teori agensi bersifat deduktif ataupun induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, walaupun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomi bukannya psikologi dan sosiologi. Agensi (*agency*) didefinisikan sebagai perilaku ataupun kegiatan tertentu yang dilakukan manusia dan yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi akan terjadi.

### 2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### 2.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Fahmi (2012:2) Kinerja keuangan menurut Fahmi adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Mahmudi (2019: 45) penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Selain itu, ukuran 13 kinerja tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan

arah atau tonggak-tonggak (*milestone*) sejauh mana tujuan organisasi tercapai. Muhmudi (2019: 60) pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas. Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dalam organisasi sektor publik pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money*). Jika suatu aktivitas tidak memiliki ukuran kinerja, maka akan sulit bagi organisasi untuk menentukan apakah aktivitas tersebut sukses atau gagal. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa ahli pengukuran kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dalam rangka mewujudkan sasaran, visi dan misi, baik deskripsi gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dari seorang atau kelompok untuk ekonomis dan efisiensi serta efektivitas perusahaan.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan atas suatu fenomena yang ada serta menggambarkan secara jelas dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data realisasi APBD dan Laporan rincian DAU yang memiliki kaitan dengan kinerja keuangan, PAD, belanja modal, dana alokasi umum dalam Pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data runtut waktu 3 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dan data yang terdiri atas 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, sehingga merupakan *pooled the data* yaitu gabungan antara *data time series* (tahun 2017-2021 : 3 tahun) dengan data 30 kabupaten/kota yang diperoleh dari LKPD yang dipublikasi oleh BPK.

### 3.1. Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2010).

### 3.2. Model Analisis dan Uji Hipotesis

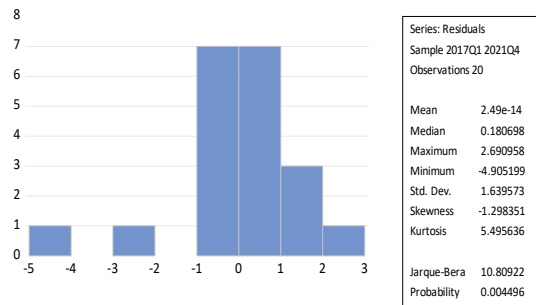
Hasil Metode analisis Deskripsi, menyatakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan. Untuk membuktikan hipotesis penelitian, dilakukan Uji F (Silmultan) dan Uji t (spasial) pengolahan data berbantuan Eviews V . 12.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

Hasil uji regresi berganda diperoleh sebagaimana tabel 1 dan 2.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**



Uji Jarque-Bera mempunyai nilai chi square dengan derajat bebas dua. Jika hasil uji jarque-bera lebih besar dari nilai *chi square* = 5%, maka hipotesis nol diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil uji jarque-bera lebih kecil dari nilai *chi square* = 5%, maka hipotesis nol 50 ditolak yang artinya tidak berdistribusi normal.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	2.012726	Prob. F(3,16)	0.1527
Obs*R-squared	5.479744	Prob. Chi-Square(3)	0.1399
Scaled explained SS	7.883179	Prob. Chi-Square(3)	0.0485

**Uji Hipotesis**

Hasil uji F sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3**  
**Hasil Autokorelasi**

---



---

Durbin-Watson
1.523528

---



---

**Uji t**

Nilai *t-statistic* untuk Belanja Modal sebesar -0.339795, Nilai *t-statistic* untuk Dana Alokasi Umum sebesar -0.212417, dan nilai *t-statistic* untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.269304. Sedangkan nilai *t* Tabel sebesar 1.98969, sehingga dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan nilai *t-table*, variabel Belanja Modal memiliki nilai *t* hitung < *t* table (-0.339795 < -1.98969), maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, jika signifikansi, 0,05 maka H1 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H1 di tolak. Karena signifikansi pada uji *t* kurang dari 0.05 (0,0049 < 0.05) maka H1 diterima. Artinya Belanja Modal berpengaruh negative dan signifikan.

Berdasarkan nilai *t* table, variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai *t* hitung < *t* table (-0.212417 < -1.98969), maka H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh negative terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah, Jika signifikansi < 0,05 maka H2 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 (0.8321 < 0,05) maka H1 diterima. Artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan

Berdasarkan nilai *t* table, variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *t* hitung > *t* table ( 0.054227 > 1.98969), maka H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel

Pendapatan Asli Daerah, jika signifikansi < 0.05 maka H3 diterima, dan jika signifikansi > 0.05 maka H1 di tolak. Karena signifikansi pada uji *t* kurang dari 0.05 (0.7881 < 0.05) maka H3 diterima. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan.

**4.2. Pembahasan**

**4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara parsial, dapat dilihat ukuran pemerintah daerah memiliki koefisien regresi positif sebesar -0.054106 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.7345 lebih kecil dari nilai - 0.05, dan *t*-hitung -0.339795 < *t*-tabel - 1.98969 maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan sehingga dalam penelitian ini Ho di tolak dan H1 diterima. Hasil uji R2 pada penelitian ini adalah 0,0811 atau sebesar 81,1%, nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan erat variabel independent terhadap variabel dependen.

**4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kinerja Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara parsial, dapat dilihat ukuran pemerintah daerah memiliki koefisien regresi positif - 0.022306 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.0001 lebih kecil dai nilai =0,05, dan *t*-hitung - 0.212417 < *t*-tabel 1.98969 maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan sehingga dalam penelitian Ho di tolak dan H1 diterima. Hasil uji R2 pada penelitian ini adalah 0,811 atau sebesar 81,1% nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan erat variabel independent terhadap variabel dependen.

Penelitian selaras dengan Novitasari (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah hal ini dikarenakan besarnya Dana Alokasi Umum akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah.

#### 4.2.3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian regresi uji secara parsial, dapat dilihat Belanja Modal memiliki koefisien regresi positif sebesar -0.054106 dan nilai signifikansi (probabilitas) sebesar 0.0000 kurang dari nilai  $\alpha=0,05$ , sedangkan t-hitung  $-0.339795 > t\text{-tabel } 1.98969$  maka dapat disimpulkan variabel Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kinerja Keuangan Daerah H4 diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut maka pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian R<sup>2</sup> diperoleh sebesar 0,811 atau 81,1% yang berarti adanya terkaitan hubungan yang sangat erat antara variabel independent dan variabel dependen, sedangkan sisanya 18,9% disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

#### 5. SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa PAD memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan Pemda, dana alokasi umum tidak memberi pengaruhnya kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Keseluruhan variabel independen dengan bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen.

#### 6.REFERENSI

- Astiti, N. D., & Mimba, S. N. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 1924-1950.
- Harjito, Y., Nugraha, G. S., & Yulianto. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FEB.UN PGRI Kediri, 19-28.
- Jauhar, F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kab/Kota Se Sumatera barat. Jurnal Akuntansi.

- Machmud, J., & Radjak, L. I. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Internal, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan. Gorontalo. Journal Of Accounting Science, 17-32.
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P., & Sumual, J. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 119-128.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM 26 SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Medanbisnisdaily.2021.Retrieved from [https://medanbisnisdaily.com/https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/06/24/137897/pdip\\_sumut\\_sebut\\_kinerja\\_keuangan\\_pemprov\\_sumut\\_2020\\_bobrok](https://medanbisnisdaily.com/https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/06/24/137897/pdip_sumut_sebut_kinerja_keuangan_pemprov_sumut_2020_bobrok)
- Sugiyono (2019:137) “pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya”
- Mulyani, S., & Wibowo, H. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan ( Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015). Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 57-66.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

- Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Fordem*
- Ofasari, D. 2018. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Banyuwangi Dengan Menggunakan Metode Valur For Money. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, 57-66. Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen* , 2834-2861
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 110-120.
- Sari, B. I., & Halmawati. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *JEA : Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1-11.
- Sari, N. D., & Mustanda, I. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen* , 1080-1110.
- Thalib, F. 2019. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Di Jawa Timur Periode 2013-2017. *eprints perbanas*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah..
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Wiguna, K. Y. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah